

## ASPEK GRAMATIKAL DALAM WACANA POLITIK: KAJIAN REFERENSI

Suwarna

Pendidikan Bahasa Daerah, FBS – UNY

### ABSTRACT

*The study is about grammatical aspects of the political discourse. Using technique of formal discourse analysis, especially focussing on cohesion, the grammatical aspects of political discourse show particular characteristics. Although in general they show reference, ellipsis, and conjunction, the discussion of the grammatical aspects is only limited on referenc. The findings show that the use of reference in the political discourse can be clasified into seven types: (1) reference showing cohesion which tends to be formal and standard; (2) reference having types of endophoric and exophoric, anaphoric, cataphoric, anaphoric and cataphoric, pronoun, demonstrative, and comparative pronoun reference consisting of temporal, locational, situational, equivalent, naming, historical; and reference having forms of lexical, phrasal, sentencial, paragraph, and discourse; (3) endophoric reference which is more productive than exophoric one; (4) anaphoric reference which is more productive than cataphoric one; (5) phrasal reference which is more productive than lexical, sentencial, paragraph, and discoursal ones; (6) cataphoric reference which tends to be phrasal and paragraph; and (7) discourse reference which is typically exophoric.*

**Key words:** *grammatical aspect, cohesion, reference, political discourse, and korpus data*

### 1. Pendahuluan

Dalam dunia politik kata wacana merupakan salah satu kata yang disebut atau digunakan oleh para pelaku politik. Dalam berbagai kesempatan dan kepentingan para pelaku politik melontarkan ide, gagasan, yang ditangkap oleh para audien untuk ditanggapi, dipikirkan, dikaji, dan dianalisis oleh audien. Audien dapat berasal dari kelompoknya maupun di luar kelompoknya (partainya). Ini berarti pelaku politik telah melontarkan wacana. Wacana itu untuk ditanggapi, dikaji, dianalisis, kembangkan, dicarikan solusi, atau bahkan untuk dilawan karena paradoks dengan kepentingan partai yang lain. Oleh karena itu, biasa didengar ucapan, *"Itu sedang menjadi wacana di negara kita."*

Di sisi lain ada yang disebut wacana politik. Inti dari wacana politik adalah gagasan, ide, dan paparan secara utuh dan terpadu yang mengandung nuansa pemerintahan, kekuasaan, dan kepemimpinan suatu negara. Dengan kata lain, apapun bentuknya, bagaimanapun cara penyajiannya, siapapun penyampainya, apabila paparan itu terkait dengan masalah pemerintahan, kekuasaan, kepemimpinan suatu negara dapat disebut wacana politik.

Kata wacana juga sangat terkenal dalam studi linguistik. Wacana adalah unit bahasa yang lebih besar dari kalimat. Analisis wacana dalam studi linguistik merupakan reaksi dari bentuk linguistik formal yang lebih memperhatikan pada unit kata, frase, klausa, dan kalimat semata tanpa

melihat keterkaitan di antara unsur tersebut. Analisis wacana kebalikan dari studi linguistik formal. Analisis wacana justru memusatkan perhatian pada tataran di atas kalimat seperti hubungan gramatikal yang terbentuk pada tataran yang lebih besar dari kalimat (Eriyanto, 2005:3).

Banyak aspek yang dikaji dalam analisis wacana, misalnya referensi, praanggapan, implikatur, inferensi, struktur wacana, gramatika kewacanaan, wacana lisan dan tulis, kajian wacana (: masyarakat tutur, peristiwa tutur, dan tindak tutur), wacana kritis, penafsiran makna, aspek gramatikal, aspek leksikal wacana, dsb.

Aspek gramatikal merupakan sarana kekohesifan suatu wacana. Kohesi adalah hubungan bentuk dalam suatu wacana. Wacana yang memiliki kohesif tinggi mendukung kepaduan dan keutuhan wacana. Walaupun demikian, kepaduan dan keutuhan wacana juga didukung unsur yang lain yaitu koherensi. Koherensi adalah hubungan makna suatu wacana. Wacana tidak hanya terdiri struktur formal, tetapi juga struktur batin yang disebut koherensi (Cook, 1989:6-7). Koherensi bukan kelengkapan teks yang melekat, tetapi muncul melalui interpretasi dan anggapan dasar terhadap pemahaman partisipan (Bublitz (1988: 28-32). Jika dibandingkan dengan koherensi, kedudukan kohesif masih subordinat. Artinya, koherensi suatu wacana memiliki peran lebih dominan dalam membentuk kepaduan dan keutuhan wacana, Terbukti wacana yang utuh dan padu pasti memiliki daya koherensi, tetapi tidak harus kohesif. Namun demikian, wacana dapat dikatakan "sempurna" apabila memiliki sifat kohesi dan koherensi (Halliday & Hasan, 1994: 2).

Mengingat fungsinya (sebagai pemertali kohesif), aspek gramatikal memiliki kedudukan penting dalam membentuk kepaduan dan keutuhan wacana. Wacana

yang memiliki daya kohesif (mengandung aspek gramatikal) akan mudah dipahami. Dengan kata lain, daya kohesivitas aspek gramatikal dapat menambah tingginya tingkat keterbacaan suatu wacana. Bahkan Finch (1998: 226) menyatakan bahwa kohe-si adalah realisasi koherensi secara formal melalui hubungan referensi.

Aspek gramatikal suatu wacana menyesuaikan dengan teks dan konteks wacana. Artinya, aspek gramatikal antara wacana yang satu dengan lainnya akan berbeda dari segi jenis, produktivitas, dan bentuk. Hal ini disebabkan oleh bahasa itu representasi sosial. Namun demikian, bahasa memiliki sistem yang otonom (Leech, 1993: 69-70). Akan tetapi dalam keotonomannya menurut Morfel dan Hocket (dalam Eriyanto, 2005:45-46) bahwa bahasa tidaklah mungkin bebas nilai, semua realitas sosial ditransmisikan melalui bahasa. Aspek gramatikal dalam wacana sastra akan berbeda dengan wacana ekonomi. Aspek wacana ekonomi akan berbeda dengan wacana hukum. Aspek gramatikal wacana hukum akan berbeda dengan wacana politik. Masing-masing aspek gramatikal memiliki karakteristik sesuai dengan wacana yang memuatnya.

Aspek gramatikal dalam wacana politik sungguh menarik sebab (1) wacana politik bersifat dinamis, terus berganti, berkembang, ada yang saling mendukung, saling menentang, bahkan saling menghasut dan menjatuhkan, (2) wacana politik ter-pajankan pada media massa yang tidak sulit diakses, dan (3) dengan fenomena khusus tentang politik, aspek gramatikalnya memiliki karakteristik tersendiri.

Aspek gramatika wacana terdiri dari pengacuan (referensi), penghilangan (elepsis), dan perangkaian (konjungsi) (Sumarlam, 2003:23). Kajian aspek gramatikal pada kertas kerja ini dibatasi pada referensi. Pembatasan ini dengan pertimbangan (1)

referensi merupakan kajian penting karena merujuk pada suatu hal, peristiwa, ide, gagasan, analisis, solusi, (2) referensi ini dapat bersifat mikro hingga makro (dari yang berupa bunyi bahasa, silabe, kata, frase, kalimat, paragraf, bahkan wacana, baik dalam teks maupun di luar teks); (3) referensi juga dapat berupa barang, orang, benda konkrit, dan abstrak, besar maupun kecil, sederhana maupun kompleks, dsb, (4) dengan demikian kajian referensi sudah cukup luas dan rumit, dan (5) kajian lebih mendalam dan berkualitas.

Kajian ini menggunakan sumber data wacana politik dalam media massa yang berupa surat kabar. Surat kabar yang dipilih *Kompas* (nasional), *Jawa Pos* (nasional, lokal), dan *Kedaulatan Rakyat* (lokal). Data wacana politik berupa berita politik, opini politik, dan kajian ilmiah tentang politik.

## 2. Wacana Politik

### 2.1 Wacana Politik dan Wacana dalam Politik

Perlu dibedakan antara wacana politik (*political discourse*) dan wacana dalam politik (*discourse of politic*). Sebelum sampai pada perbedaan tersebut, perlu disampaikan secara ringkas tentang politik. Dari rangkuman berbagai pakar politik, pengertian politik mengandung unsur, yaitu (1) pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang, (2) nilai itu terkait dengan kekuasaan, (3) politik juga mengandung unsur tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan atau memperluas tindakan, (4) politik juga mengatur perbuatan dalam kondisi konflik, dan (5) politik juga mengandung unsur pengaruh aktual dan potensial mengenai fungsi dan pernyataan politik atau entitas politik (Zen, 2004: 64—66).

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, wacana politik adalah berbagai informasi, peristiwa, ide atau gagasan, yang

terkait dengan kegiatan politik. Kegiatan politik merupakan aktivitas yang terkait dengan pemerintahan, kekuasaan, dan kepemimpinan untuk mengatur kegiatan manusia. Tataran kegiatan politik dari mikro hingga makro, dari partai “gurem” hingga partai “kakap”, dari tingkat pemerintahan kelurahan hingga negara.

Wacana politik ini dapat disimak dalam berita-berita media massa, baik berupa warta, opini, kajian atau artikel ilmiah, pernyataan-pernyataan politik dari politikus, profesional, dan aktivis. Wacana politik yang disampaikan oleh politikus merupakan cerminan kebijakan politik partisan. Politikus mewakili kelompok tertentu dalam tawar-menawar dan mencari kompromi pada masalah-masalah politik. Para politikus menyampaikan wacana politik dengan tujuan mempengaruhi opini publik, mempertahankan perubahan atau sebaliknya mengejar perubahan. Hal ini nyata ketika Amin Rais sebagai politikus mengulirkan pernyataan reformasi untuk mengubah situasi politik di Indonesia hingga terjadi gema dan perubahan-perubahan mendasar kegiatan politik pada era reformasi. Sebaliknya, para politikus orde baru yang tetap eksis di pemerintahan tetap terkena getahnya dituduh tetap ingin mempertahankan politik orde baru (konservatif).

Wacana politik dari para profesional merupakan realisasi keterampilan yang khas dalam mengolah simbol-simbol dan memanfaatkan keterampilan ini untuk menempa mata rantai yang menghubungkan pihak-pihak yang berbeda atau kelompok-kelompok yang dibedakan. Mereka menghubungkan pemimpin satu dengan lainnya sekaligus para pengikutnya. Para profesional ini antara lain para jurnalis dan promotor. Jurnalis adalah setiap orang yang secara langsung berhubungan dengan media berita dalam pengumpulan, persiapan, penyajian, dan laporan hingga terbit surat kabar,

majalah, berita radio, televisi, dsb. Para promotor orang yang mengajukan kepentingan tertentu dengan mendapatkan imbalan, misalnya para manajer kampanye, pelatih pidato, personil iklan politik, asisten anggota dewan, sekretaris pers kepresidenan, dsb.

Wacana politik para aktivis biasa berupa (1) laporan keputusan dan kebijakan pemerintah kepada anggota organisasi dan (2) nasihat pilitis para pemuka. Misalnya Gur Dur sebagai ketua Dewan Syura. Gus Dur tidak terlibat politik praktis, tetapi nasihat (fatwanya) sangat mewarnai politik terutama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Penjelasan tersebut terkait dengan wacana politik. Lain halnya dengan wacana dalam politik. Wacana dalam politik merupakan pernyataan-pernyataan yang disampaikan atau dilontarkan oleh politikus, profesional, atau aktivis untuk menjadi pemikiran bersama. Wacana itu tidak selalu mengindikasikan adanya keinginan terhadap perubahan atau pergeseran opini khalayak terhadap satu masalah tertentu dalam jangka pendek, tetapi sebagai pemikiran analitis untuk jangka panjang, misalnya terkait dengan visi dan misi partai. Misalnya visi dan misi yang disampaikan sebagian elite NU dalam memandang PKB di masa depan. Apa yang disampaikan oleh elite UN tersebut merupakan wacana dalam politik yang masih perlu dikaji, dianalisis, dan disosialisasikan. Jika memang disepakati, dapat saja pernyataan tersebut bergerak dari wacana dalam politik menjadi wacana politik.

Namun demikian, dalam tulisan ini, peneliti tidak membedakan antara wacana politik maupun wacana dalam politik karena perbedaan ini tidak berpengaruh pada kajian ini. Semua wacana yang berbau politik, baik yang disampaikan para politikus, profesional, maupun aktivis menjadi

bahan kajian penulis. Bahan kajian tulisan ini mengarah pada (1) berita politik, (2) kajian politik, dan (3) opini politik. Kajian ini dibatasi pada media cetak yang berupa surat kabar (koran).

## **2.2 Media sebagai Sarana Komunikasi Wacana Politik**

Dalam komunikasi media massa dibedakan menjadi dua, yaitu media massa elektronik dan media cetak. Media massa elektronik yaitu saluran komunikasi dengan menggunakan alat-alat yang berkaitan dengan listrik atau bersifat elektrik atau elektronis, misalnya televisi, radio, *compact disk* (CD), video, dan internet. Media massa cetak yaitu saluran komunikasi dengan menggunakan sarana bahasa tulis, misalnya buku, surat kabar, majalah, bulletin, jurnal, tabloid, dsb. Di negara Indonesia kedua jenis media massa tersebut sudah merupakan hal yang tidak asing. Artinya, baik media elektronik maupun media cetak sudah dapat dinikmati sebagian besar bangsa Indonesia.

Media massa, baik media elektronik maupun media cetak, merupakan sarana komunikasi yang efektif untuk berbagai wacana termasuk termasuk wacana politik. Dikatakan efektif karena (1) diversifikasi atau penyebaran media massa sangat luas, (2) proses diversifikasi itu cukup murah, apalagi media TV dan radio, dan (3) diversifikasi tidak terhambat ruang dan waktu. Artinya setiap saat orang dapat mengakses informasi, baik dari media elektronik atau media cetak, (4) demi kepentingan tertentu informasi media dapat dijaga kelestariannya, misalnya direkam, (5) bersifat bertahan (lestari atau awet), (6) dapat diputar atau dibaca, dan dikaji berulang-ulang, (7) sanggup membentuk opini bagi pembacanya, misalnya opini masyarakat bahkan opini bagi negara, dan (8) opini yang terbentuk dapat menimbulkan aksi sebagai reaksi dari informasi atau wacana dalam media massa.

Dalam hal wacana politik media massa memiliki peran yang luar biasa. Opini politik yang terbentuk dalam media massa dapat menimbulkan berbagai eksese yang luar biasa, baik yang bersifat pro dan kontra, positif, maupun negatif, bahkan bisa menimbulkan perang. Masih dapat diingat betapa gegap gempitanya semangat kebangsaan nasionalisme ketika terjadi perseteruan wilayah Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Demonstrasi massa berani mati untuk perang melawan Malaysia terjadi di mana-mana. Selanjutnya demonstrasi umat Islam semarak di berbagai negara seperti Afganistan, Mesir, Arab Saudi, Iran, dan Indonesia. Semua itu disebabkan oleh perilaku tentara Amerika Serikat melecehkan Alquran dengan membuang kitak suci umat Islam itu di toilet. Semua itu dapat ditimbulkan akibat wacana politik yang tersaji dalam media massa. Walaupun jauh dari sumber berita dan peristiwanya, dalam era globalisasi informasi ini semua peristiwa dapat diketahui oleh masyarakat di dunia dalam waktu relatif singkat tanpa yang bersangkutan harus hadir di tempat peristiwa. Segala peristiwa politik di belahan dunia langsung dapat diketahui masyarakat dunia. Semua dapat menimbulkan reaksi antara lain seperti di atas.

### **2.3 Aspek Gramatikal Wacana**

Kepaduan suatu wacana dapat dikaji dari segi bentuk dan makna. Kajian bentuk merupakan analisis struktur lahiriah, sedangkan kajian makna merupakan analisis isi atau struktur batin. Dalam hal demikian wacana dipandang wacana sebagai struktur (Schiffrin, 1994:339). Analisis struktur lahiriah menghasilkan bentuk-bentuk kohesif. Kohesi merupakan aspek gramatikal yang digunakan untuk menggabungkan kalimat sehingga membentuk teks dan relasi antrakalimat (Coulthard, 1979: 10).

Analisis isi atau struktur batin menghasilkan makna koheren. Kepaduan wacana lebih ditentukan oleh makna koheren daripada bentuk kohesif. Ini mengandung implikasi arti bahwa (1) tidak setiap bentuk kohesif selalu menghasilkan makna yang padu secara koheren, (2) makna padu secara koheren tidak selalu hanya ditentukan oleh bentuk-bentuk kohesif, dan (3) ada wacana yang koheren tetapi tidak kohesif. Lebih lanjut Sumarlam (dalam Kusrianti, 2004:6) menjelaskan bahwa dalam analisis wacana, segi bentuk atau struktur lahir wacana disebut aspek gramatikal, sedangkan segi makna atau struktur batin wacana disebut aspek leksikal wacana.

Antara aspek gramatikal dan aspek leksikal saling terkait untuk melahirkan suatu wacana yang utuh walaupun keutuhan wacana lebih ditentukan aspek makna. Aspek makna ini terkandung dalam leksikal bahasa. Makna leksikal yang dipadukan dengan aspek gramatikal akan melahirkan wacana yang utuh. Dengan kata lain, keutuhan, kepaduan, dan keterbacaan wacana dengan mudah apabila wacana itu didukung oleh aspek gramatikal dan aspek leksikal. Dalam posisi yang demikian aspek gramatikal wacana memiliki kontribusi yang sangat penting. Namun demikian, aspek gramatikal tidak selalu harus muncul. Kepaduan wacana tidak hanya ditentukan aspek gramatikal, tetapi juga aspek leksikal. Bahkan aspek leksikal dalam konteks makna lebih memegang peranan penting daripada aspek gramatikal.

Aspek gramatikal berbeda dengan gramatika wacana. Aspek gramatika mengacu pada bentuk-bentuk kohesif yang menjadikan wacana utuh dan memiliki keterbacaan tinggi. Artinya, wacana yang memiliki bentuk-bentuk kohesif akan lebih mudah dipahami daripada wacana tanpa bentuk kohesif. Namun begitu, aspek gramatika memang tidak selalu muncul

dalam wacana. Sebaliknya, gramatika pasti terjadi dalam suatu wacana. Jajaran verbal, baik lisan maupun tertulis, tidak dapat dikatakan sebagai wacana apabila tidak disusun secara gramatika. Semua itu hanya akan berupa lontaran verbal yang hanya memiliki arti secara leksikal terpisah, tidak padu, dan tidak utuh. Itu semua hanya berupa potongan-potongan leksikon yang memiliki arti mandiri. Sebaliknya, apabila leksikon-leksikon itu dipadukan secara gramatika, akhirnya dapat dimaknai secara utuh dan padu. Itulah wacana.

Aspek gramatika wacana terdiri dari pengacuan (referensi), penghilangan (elepsis), dan perangkaian (konjungsi) (Sumarlam, 2003:23). Referensi adalah hubungan antara kata dengan bendanya atau kata menunjuk benda (Lyons, 1970: 404). Referensi satuan lingual yang terdapat di dalam teks disebut referensi endoforis. Sebaliknya, apabila referensi satuan lingual itu berada di luar teks disebut eksoforis (Halliday dan Hasan (1979: 31). Referensi endofora adalah referensi terhadap anteseden yang terdapat di dalam teks (*intratekstual*). Referensi endofora dapat diwujudkan dengan pronomina persona, pronomina demonstratif, dan pronomina komparatif. Pengacu dan yang diaju bersifat koreferensial. Artinya, saling terkait antara pengacu dan yang diaju atau kata dan bendanya, baik abstrak maupun konkret.

Referensi merupakan salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu mengacu pada satuan lingual yang lain yang mendahului atau mengikutinya. Satuan lingual yang mengacu pada satuan lingual yang mendahuluinya disebut referensi anaforis. Sebaliknya, satuan lingual yang mengacu pada satuan lingual yang mengikutinya disebut referensi kataforis. Dengan kata lain, anafora memiliki sifat referensi mundur, sedangkan katafora memiliki sifat referensi ke depan (Wales, 2001: 337). Referensi mundur artinya kata

itu mengacu pada hal yang telah disebutkan sebelumnya. Referensi ke depan artinya kata itu mengacu pada hal-hal yang disebutkan berikutnya.

Ditinjau dari wujud satuan lingual, referensi di dalam teks adalah satuan lingual yang diacu berada dalam suatu teks wacana, bersifat eksplisit, atau tersurat, wujudnya dapat berbagai macam sari bunyi lingual, silabe, kata, frase, klausa, kalimat, alenia, sub-bab, bab, bahkan beberapa bab. Teks merupakan istilah teknis yang mengacu pada rekaman verbal pada tindak komunikasi (Brown & Yule, 1983:6). Yang jelas semua itu bagian dari wacana.

Ditinjau dari arti atau makna, referensi endoforis dapat makna secara leksikal maupun gramatikal. Untuk memperjelas referensi, terkadang penutur menunjukkan isyarat tertentu (Coulthard, 1979), baik hanya isyarat maupun referensi ditambah isyarat. Secara klasifikasi acuan itu dapat berupa berita, kasus, sebutan, jabatan, kondisi atau keadaan, informasi, penggalan informasi, ide. Menurut sifatnya ada yang sekadar mengacu, ada yang bersifat antonim atau paradoks, ada yang bersifat ekuivalen, kolokasi, dan persamaan. Berdasarkan jenisnya, referensi dapat dibedakan menjadi referensi persona, (persona I, II, III tunggal seperti *aku, kau, dan dia* atau *ku, mu, dan nya*) atau persona jamak (*kita/kami, anda semua, dan mereka*).

Referensi eksofora adalah referensi terhadap anteseden yang terdapat di luar teks (*extratekstual*). Artinya, kata-kata itu mengacu pada bendanya, tetapi benda yang diaju tidak terdapat di dalam teks, tetapi terdapat di luar teks.

### **3. Referensi dalam Wacana Politik**

Ditinjau dari jenisnya, referensi dibedakan menjadi referensi enfora dan eksofora.

Referensi endofora adalah pengacu-an terhadap anteseden yang terdapat dalam teks. Yang mengacu maupun diacu terdapat dalam teks wacana politik.

- (1) Pancasila mengajarkan keadilan sosial tapi perilaku yang sering mengemuka adalah kedhaliman atau sewenang-wenang, tindakan main sendiri dan sejenisnya. Kuat dugaan, meletupnya berbagai tindakan tidak Pancasilais tersebut bersumber dari semakin tipisnya penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai yang diajarkan Pancasila. (KR, 1 Juni 2005).
- (2) PNS ataupun masyarakat pada umumnya saat ini sudah semakin dewasa dalam menentukan pilihannya. Mereka tidak mau didikte/dipaksa-paksa begitu saja. Selain itu, berapa sih jumlah PNS di suatu daerah, tetap saja kalah banyak dibanding masyarakat umum non-PNS. (Jawa Pos, 15 April 2005).

Korpus *tindakan yang tidak Pancasilais tersebut, mereka, dan itu* merupakan referensi endofora. Semua yang diacu benar-benar ada di dalam teks. Kata *tersebut* pada contoh (1) mengacu pada pernyataan *kedhaliman atau sewenang-wenang, tindakan main sendiri dan sejenisnya. Tindakan kedhaliman atau sewenang-wenang, tindakan main sendiri dan sejenisnya* merupakan tindakan yang tidak Pancasilais. Antara *tindakan yang tidak Pancasilais* dengan *tindakan tersebut* sebenarnya bersifat kolokasi sehingga dapat saling menggantikan atau substitusi. Hal itu dibuktikan bahwa kalimat (1a) dan (1b) memiliki makna yang kongruen.

- (1a) Pancasila mengajarkan keadilan sosial tapi perilaku yang sering mengemuka adalah kedhaliman atau sewenang-wenang, tindakan

main sendiri dan sejenisnya. Kuat dugaan, meletupnya berbagai tindakan tersebut bersumber dari semakin tipisnya penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai yang diajarkan Pancasila.

- (1b) Pancasila mengajarkan keadilan sosial tapi perilaku yang sering mengemuka adalah kedhaliman atau sewenang-wenang, tindakan main sendiri dan sejenisnya. Kuat dugaan, meletupnya berbagai tindakan tidak Pancasilais bersumber dari semakin tipisnya penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai yang diajarkan Pancasila.

Pengulangan korpus *tidak Pancasilais* untuk memberikan batas dan penekanan. Pembatasan itu ditunjukkan secara eksplisit, yaitu tindakan yang tidak Pancasilais, bukan tindakan yang lain. Artinya, tindakan itu dibatasi pada tindakan atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma Pancasila, bukan norma yang lain.

Penekanan ditunjukkan dengan adanya perulangan, yaitu perulangan korpus *tindakan yang tidak Pancasilais*. Sebetulnya tanpa diulangpun cukup dengan korpus *tindakan tersebut*. Untuk referensi *tindakan tersebut* pembaca harus kembali pada kalimat sebelumnya untuk mengetahui acuan tindakan tersebut. Apabila *tindakan yang tidak Pancasilais* diulang, selain pembaca tidak perlu kembali pada kalimat yang diacu, korpus itu menimbulkan kesan penekanan.

Korpus *mereka* pada kalimat (2) mengacu pada *PNS ataupun masyarakat pada umumnya*. Kata *itu* mengacu pada *tidak mau didikte/dipaksa-paksa*. Kohesi referensi ini juga bersifat kolokatif. Artinya, antara yang mengacu dan yang diacu bisa saling menggantikan dalam kalimat itu. Kohesi kolokasi ini merupakan hubungan keterkaitan yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur-unsur gramatikal (Alwi, 2000: 427).

Referensi eksofora adalah referensi terhadap anteseden yang terdapat di luar teks. Yang diacu terdapat di luar teks wacana politik.

- (3) Pancasila mengajarkan keimanan pada Tuhan, namun realitas Perilaku yang ditunjukkan adalah korupsi, kolusi, nepotisme, manipulasi, dan sejenisnya di berbagai lini kehidupan kita. (KR, 1 Juni 2005).
- (4) Hal ini juga diperkuat dengan dihapusnya tujuh kata kontroversial dalam Piagam Jakarta yang merupakan bahan mentah Pancasila. (KR, 1 Juni 2005).

Korpus *kita* pada contoh (3) tidak mengacu pada orang-orang yang berbicara ataupun yang dibicarakan dalam teks. Di dalam wacana politik itu tidak disebutkan atau tidak ada korpus yang berkolokasi dengan *kita*. Analisis wacana berkesimpulan bahwa korpus *kita* tidak mengacu ke acuan yang terdapat di dalam teks, tetapi di luar teks (eksofora). Kata *kita* yang dimaksud adalah *kita* semua bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila. Dalam teks itu baik secara anafora maupun katafora tidak ada yang menyebut bangsa Indonesia. Penulis wacana politik berkeyakinan bahwa pembaca memahami referensi korpus *kita*, yaitu *bangsa Indonesia*. Oleh karena itu, ditinjau dari aspek formal (materi bahasa) maupun aspek makna, simpulan analisis memenuhi syarat bahwa korpus *kita* (1) bersifat eksofora dan (2) yang dimaksud *kita* adalah bangsa Indonesia.

Korpus *tujuh kata* kontroversial bersifat eksofora. Dalam teks tidak ditemukan tujuh kata yang diacu. Apabila pembaca ingin mengetahui ketujuh kata kontroversial yang dimaksud penulis, pembaca harus mencari teks lain mengenai sejarah kelahiran Pancasila atau mencari teks Piagam Jakarta yang merupakan bahan mentah Pancasila.

Ditinjau dari produktivitas, referensi endoforis lebih produktif daripada referensi eksoforis.

Ditinjau dari sifatnya, referensi dipilah menjadi dua yaitu referensi anafora dan katafora. Kedua-duanya masih tergolong pada jenis referensi endofora.

Referensi anafora adalah pengacuan pada anteseden yang telah disebutkan sebelumnya atau *backward-looking* (Wales, 2001: 337). Anteseden, satuan lingual, atau korpus yang disebutkan sebelumnya dapat berupa kata, frasa, kalimat, bahkan paragraf.

- (5) ... dengan tetap mantapnya wibawa pengaruh AR (Amien Rais) dan PAN..., AR juga sekaligus mengeratkan genggamannya atas organisasi Islam modern ini. (Kompas, 12 April 2005).
- (6) Telah luas diketahui secara umum bahwa SB adalah pendana utama kampanye presidensial Amien Rais (AR) tahun lalu. Karena itu, AR sedari awal condong menyodorkan dan mendukung SB. (Kompas, 12 April 2005).
- (7) .....Dengan modal politik yang demikian minim, hampir pasti SB (Soetrisno Bachir) tidak akan mampu meyakinkan rekan-rekannya... (Kompas, 12 April 2005).

Korpus *organisasi Islam modern ini* pada contoh (5) mengacu pada PAN atau Muhammadiyah yang telah disebutkan sebelumnya. Referensi tersebut bersifat *backward-looking* (referensi ke belakang/hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya). Referensi itu berupa kata, yaitu PAN atau frase *Partai Amanat Nasional*. Tanda ... pada contoh (5) sebagai tanda bahwa ada data yang tidak dikutip berupa kalimat.

Korpus *itu* pada contoh (6) mengacu pada korpus yang berupa kalimat. Kata *itu*

berkolokasi dengan kalimat *Telah luas diketahui secara umum bahwa SB adalah pendana utama kampanye presidensial Amien Rais (AR) tahun lalu*. Sifat referensinya juga anaforis.

Korpus *modal politik yang demikian minim* pada contoh (7) mengacu pada paragraf-paragraf sebelumnya. Paragraf sebelumnya menceritakan perjalanan Soetrisno Bachir yang tidak memiliki bekal politik yang cukup untuk berkiprah di dunia partai politik dan baru dua bulan menjadi anggota partai. Referensi *modal politik yang demikian minim* kepada tiga paragraf sebelumnya. Tanda titik-titik sebaris menunjukkan adanya paragraf (tiga paragraf) yang tidak dikutip.

Referensi katafora adalah pengacuan kepada anteseden yang disebutkan berikutnya (*forward-looking*).

- (8) Jelas dengan beroperasinya perusahaan-perusahaan jasa keamanan akan menimbulkan permasalahan baru..... (Kompas, 27 Mei 2005).
- (9) Menurut saya, sisi negatifnya juga banyak. Antara lain:
1. Kemauan dan kemampuan .....
  2. Pengerahan PNS.....
  3. Media yang dekat dengan penguasa .....
  4. Masyarakat umum yang kurang percaya... (Jawa Pos, 15 April 2005)
- (10) Dimensi-dimensi ideologis yang perlu kita serasikan meliputi tiga hal berikut. Pertama, dimensi idealitas. .... Kedua, dimensi realitas ..... Ketiga, dimensi fleksibilitas ..... (KR, 1 Juni 2005)

Korpus *-nya* pada contoh (8) mengacu pada anteseden berikutnya, yaitu *perusahaan-perusahaan jasa keamanan*. Karena referensi pada anteseden yang disebutkan berikutnya, referensi itu bersifat kataforis. Demikian juga korpus *permasa-*

*lahan baru* mengacu pada *berbagai prediksi permasalahan baru* yang diuraikan oleh penulis pada paragraf-paragraf berikutnya. Referensi kataforis bukan hanya berupa frase, kalimat, melainkan juga paragraf.

Referensi kataforis berupa paragraf juga terdapat pada contoh (9) dan (10). Korpus *antara lain* dan *berikut* mengacu pada uraian selanjutnya. Uraian itu berupa paragraf-paragraf. Demi efisiensi, analisis tidak menuliskan secara lengkap paragraf itu karena analisis yakin bahwa pembaca sudah dapat memahami contoh tersebut.

Ditemukan pula sifat referensi anaforis dan kataforis. Artinya, korpus yang dimaksud mengacu pada anteseden yang disebutkan sebelumnya maupun sesudahnya.

- (11) Dengan modal politik yang demikian minim, hampir pasti SB (Soetrisno Bachir) tidak akan mampu meyakinkan rekan-rekannya dalam partai berlambang sinar matahari yang semakin redup itu....(Kompas, 12 April 2005).
- (12) Ketajaman intuisi politik, keandalan manajemen parpol, dan kemampuan artikulasi politik sangat dituntut dari Ketua Umum PAN yang baru. (Kompas, 12 April 2005).

Korpus *partai berlambang sinar matahari yang semakin redup itu* pada contoh (11) mengacu pada lambang PAN yaitu partai yang berlambang matahari bersinar. Acuan PAN dalam wacana politik yang berjudul Partai Amanat (Nasional) Amien Rais terdapat di mana-mana, baik sebelum korpus *partai berlambang sinar matahari yang semakin redup itu* maupun sesudahnya. Kata PAN menyebar dari awal hingga akhir wacana politik tersebut.

Demikian pula korpus *Ketua Umum PAN yang baru* pada contoh (12) mengacu pada *Soetrisno Bachir*. Acuan Soetrisno

Bachir terdapat dari awal hingga akhir wacana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa referensi tersebut bersifat anaforis dan kataforis.

Apabila dikaitkan dengan induknya, referensi endoforis ada yang bersifat anaforis dan kataforis. Dapat pula disebut referensi endoforis anaforis dan endoforis kataforis. Referensi endoforis anaforis terdapat pada contoh (1), (2), (5), (6) dan (7). Adapun referensi endoforis kataforis terdapat pada contoh (8), (9), (10).

Ditinjau dari produktivitas, referensi anaforis lebih produktif daripada referensi kataforis.

Ditinjau dari macamnya, referensi dibedakan menjadi referensi pronomina persona, demonstratif, dan komparatif (Rani dkk, 2004: 100-105).

Referensi persona adalah pengacuan dengan menggunakan kata ganti orang. Referensi persona mengacu pada peran seseorang sebagai partisipan. Persona ini ada persona I, II, dan III, tunggal dan jamak.

- (13) Tetapi saya yakin, media massa umum yang profesional tidak akan bersikap seperti itu dalam pilkada. Saya yakin pula jumlahnya juga sangat banyak di negeri ini. Saya tidak perlu menyebut nama media itu. (*Jawa Pos*, 15 April 2005).
- (14) Kita tahu sadar bahwa nilai-nilai dari kelima sila Pancasila mengajak kebajikan. Akan tetapi, di antara kita menjadi masa bodoh ... (*KR*, 1 Juni 2005).
- (15) "Saya tidak akan menganggap mereka sebagai oportunist, tapi karena mereka mau loyal terhadap partai dan sepenuhnya bertanggung Jawab terhadap konsituen mereka yaitu PKB" kata Khofifah (*KR*, 19 Mei 2005).

Korpus *saya* pada contoh (13)

mengacu pada penulis, yaitu Mundzar Fahman. Mundzar Fahman adalah wartawan *Jawa Pos* yang sekarang menjadi direktur Radar Bojonegara. Mundzar Fahman menulis artikel politik berjudul Pilkada dan Dilema Media Massa pada harian *Jawa Pos* tanggal 15 April 2005.

Korpus *saya* pada contoh (13) berbeda dengan *saya* pada contoh (15). Kalau *saya* pada contoh (13) mengacu pada penulisnya, *saya* pada contoh (15) mengacu pada seorang tokoh politik (politikus) yang disebut dalam tulisan. Diacu dengan menggunakan kata *saya* karena tulisan dalam wacana politik itu berupa kutipan. Karena berupa kutipan, penulisnya tidak perlu mendelesikan kata *saya*. *Saya* pada contoh (15) mengacu pada Khofifah.

Korpus *kita* pada contoh (14) mengacu pada pembaca sebagai bangsa Indonesia. Jadi, bersifat eksoforis. Penulis mengajak para pembaca untuk melakukan empati bersama dilema media massa pada masa-masa pemilihan kepala daerah (pilkada).

Baik *saya* maupun *kita* merupakan personal I. *Saya* sebagai persona I tunggal dan *kita* sebagai persona I jamak (penulis dan pembaca). Adapun mereka merupakan persona III jamak. *Mereka* yang dimaksud pada contoh (15) dapat dicari pada dua paragraf sebelumnya. *Mereka* itu adalah orang-orang yang menandatangani pernyataan kesetiaan terhadap kubu Muahimin.

- (16) Lemahnya pengamanan negara-negara pantai memberi peluang pihak asing mengambil manfaat dari kondisi yang ada, baik aktif-aktif negara maupun non-negara (*Kompas*, 27 Mei 2005).
- (17) Jadi eksistensi Pancasila dalam realitas-nya sekarang semakin meredup maka sumber permasalahan bukan pada Pancasila-nya tapi pada lemahnya penghayatan dan pengamalan terhadap sila-silanya (*KR*, 1 Juni 2005).

Korpus *-nya* pada contoh (16) mengacu secara kataforis terhadap *pengamanan negara-negara pantai*. *Nya* tersebut berbeda dengan *-nya* pada realitasnya pada contoh (17), berbeda pula dengan *-nya* pada *Pancasilanya*. Akan tetapi *-nya* pada *lemahnya* pada contoh (16) memiliki karakter yang sama dengan *-nya* pada *lemahnya* pada contoh (17). Kebetulan sama juga korpusnya, yaitu *lemahnya*. Namun *lemahnya* pada contoh (16) berarti kekurangan pengamanan negara-negara pantai, sedangkan *lemahnya* pada contoh (17) adalah kekurangan penghayatan dan pengamalan sila-sila dalam Pancasila.

Korpus *-nya* pada *lemahnya* contoh (16) dan (17) merupakan referensi kataforis yang bersifat eksplanasi, yaitu penjelasan. *Nya* diperjelas dengan uraian penjelas yang mengikutinya seperti *lemahnya pengamanan negara-negara pantai, lemahnya penghayatan dan pengamalan terhadap sila-silanya*.

Korpus *-nya* yang menyatakan milik adalah pada *Pancasilanya* dan *sila-silanya*. *Nya* pada *Pancasilanya* menyatakan bahwa Pancasila adalah milik bangsa Indonesia. Di dunia ini yang memiliki dasar negara Pancasila hanya bangsa Indonesia. Adapun *-nya* pada *sila-silanya* mengacu secara anaforis dengan kata ganti persona *nya* untuk *Pancasila*. *Nya* pada *sila-silanya* dapat berkolokasi dengan *Pancasila*. Ini terbuk bahwa korpus *lemahnya pengamanan negara-negara pantai, lemahnya penghayatan dan pengamalan terhadap sila-silanya* berkuivalen dengan *lemahnya pengamanan negara-negara pantai, lemahnya penghayatan dan pengamalan terhadap sila-sila Pancasila*.

Di sisi lain hal yang menarik adalah (1) saya tidak/belum menemukan kata ganti orang pertama *aku*, baik secara mandiri atau menjadi klitik, baik proklitik seperti *kuambil, kutulis, dan kubaca*, dan enklitik seperti

*tulisanku, gagasanku* (Halliday & Hasan, 1979:54-55), (2) saya tidak/belum menemukan kata ganti orang kedua, seperti *kamu, engkau, kau*.

Temuan yang demikian menggelitik untuk melakukan analisis prediktif. Surat kabar tidak menggunakan kata ganti *aku*, baik secara mandiri/ morfem bebas maupun sebagai klitik karena (a) wacana politik dalam surat kabar dituntut menggunakan bahasa yang baku. Kata *saya* merupakan diksi yang tepat dalam surat kabar daripada kata *aku*. Sebaliknya, kata *aku/-ku* akan lebih tepat jika digunakan dalam puisi, novel, percakapan sehari-hari. Jadi, ini hanya masalah diksi. (b) Penulisan wacana politik bersifat formal sehingga diksi *saya* lebih tepat daripada *aku/-ku*.

Hal yang juga menarik bahwa penulis sekarang sudah berani menonjolkan referensi persona I (*saya*). Sebelumnya penulisan ilmiah/populer disarankan tidak menggunakan *saya*, tetapi menggunakan persona III agar terlepas dari nuansa emosional. Akan tetapi, hal itu sudah tidak tabu lagi.

Penulis juga tidak/belum menemukan kata ganti orang II seperti *anda, kamu, engkau*. Hal ini disebabkan oleh karakter media, bahwa sebetulnya antara pembaca dan penulis sudah berkomunikasi, yaitu dengan komunikasi tulis. Penulis tidak merasa perlu untuk mengeksplisitkan kata *anda, engkau, dan kamu*, karena dianggap sudah sepele. Selain itu kata ganti II cenderung bernuansa direktif, padahal media masa (wacana politik) bersifat informatif dan problematik yang menuntut dan merangsang pemikiran, baik secara komprehensif maupun analitis.

Hal yang menarik juga pada referensi persona *-nya*. Ternyata referensi persona *-nya* dapat mengacu ke berbagai hal, antara lain (1) milik seperti *partainya, sila-silanya, pendapatnya, analisisnya, dsb.* (2) ada juga *-nya* yang menuntut acuan

penjelas, seperti *lemahnya pengamanan negara-negara pantai, lemahnya penghayatan dan pengamalan sila-sila Pancasila, minimnya bekal politik, dsb.*

Referensi temporal adalah pengacuan yang berkaitan dengan waktu.

(18) Saat ini pengamanan Selat Malaka oleh instansi-instansi terkait sudah terjebak rutinisme. (Kompas, 27 Mei 2005).

(19) Hingga kini kita masih belum dapat mewujudkan cita-cita itu. (KR, 1 Juni 2005).

Korpus *saat ini* mengacu pada pengertian waktu yang relatif, *indefinite*, atau *unrestrictive*. Contoh tersebut diambil dari wacana politik tentang persetujuan antara Indonesia dan Malaysia mengenai wilayah Ambalat. Dengan mengacu muatan wacana politik tersebut, korpus *saat ini* tidak memiliki batasan waktu yang jelas, dapat mengacu minggu, bulan, atau tahun. Yang jelas bukan mengacu pada pengertian waktu sesaat dengan hari, tanggal, jam, menit atau detik tertentu. Pengacuan waktu *saat ini* pada contoh (18) sangat berbeda dengan referensi temporal *saat ini* pada kalimat "*AR dapat dengan mudah memainkan perannya sebagai King Marker di wadah yang beranggotakan paling kurang 25 jutaan muslim yang akan muktamar pada bulan Juni tahun ini (Kompas, 12 April 2005).*" Pada bulan Juni tahun ini mengacu pada waktu yang jelas dan menentu.

*Hingga kini* pada contoh (19) juga bersifat relatif, dapat mengacu hingga hari ini, bulan ini, tahun ini, dekade ini, dsb. Dikaitkan dengan muatan politis tentang cita-cita penghayatan dan pengamalan Pancasila secara murni dan konsekuen baru sebatas cita-cita. Hingga kini hal itu belum tercapai. Dengan demikian, referensi tem-

poral *hingga kini* memiliki rentangan waktu yang semenjak Pancasila dirumuskan oleh para pejuang kemerdekaan hingga kini.

Referensi lokasional adalah pengacuan yang berkaitan dengan tempat.

(20) ... akan sangat sukar bagi SB untuk memimpin PAN dengan kepala tegak, baik di hadapan jemaahnya sendiri, apalagi di hadapan publik nasional (Kompas, 12 April 2005).

(21) Presiden Bush telah mendukung kehendak kami untuk merdeka, yang dinyatakannya dengan jelas dalam visi soal dua negara sebagai solusi atas konflik Timur Tengah (Kompas, 27 Mei 2005).

(22) Israel menyediakan dana 280 juta dollat AS untuk membiayai kedatangan kaum muda Yahudi dari seluruh dunia untuk datang dan tinggal di Israel ((Kompas, 27 Mei 2005).

Referensi lokasional pada *di hadapan jemaahnya sendiri, apalagi di hadapan publik nasional* pada contoh (20) lebih abstrak dan tidak menentu (*indefinite, unrestrictive*) apabila dibandingkan dengan referensi pada korpus *Timur Tengah* dan *Israel* pada contoh (21) dan (22). Akan tetapi, *Timur Tengah* pun sebenarnya juga terlalu luas dan kurang jelas (secara pasti) apabila dibandingkan dengan referensi korpus di *Israel* (yang sudah jelas dan pasti/*definite/restrictive*). Referensi temporal *dari seluruh dunia* pada contoh (22) mengacu pada wilayah yang cukup luas, lebih luas daripada acuan *Timur Tengah*, dan sama-sama, belum dapat ditentukan secara pasti *Timur Tengah* di kota apa, wilayah di mana, dan dari seluruh dunia (dari negara mana, kota apa, dsb).

Referensi situasional adalah pengacuan yang terkait dengan situasi tertentu.

(23) Dalam konteks ini agaknya sebuah langkah tepat yang perlu kita lakukan adalah merenungkan kembali apa peran esensial Pancasila... (KR, 1 Juni 2005).

Korpus *dalam konteks ini* mengacu pada paragraf-paragraf sebelumnya, di mana penulis menguraikan perjalanan bangsa Indonesia dalam usaha mengahayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Referensi situasional memang cukup luas.

Referensi ekuivalensi adalah pengacuan di mana antara pengacu dan yang diacu memiliki kesamaan, kesejajaran, atau kekongruenan. Karena memiliki sifat-sifat tersebut, referensi ekuivalensi bersifat kolokasi. Artinya, saling dapat menggantikan posisinya dalam kalimat atau wacana tersebut.

(24) Menurut Hajriyanto Y Tohari, wakil sekretaris PP Muhammadiyah, calon ketum PP Muhammadiyah nantinya akan dipilih dalam Muktamar ke-45.... (KR, 19 Mei 2005).

(25) ...Dia adalah orang-orang yang sangat memegang komitmennya” kata Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice. (Kompas, 27 Mei 2005).

Antara Hajriyanto Y Tohari dan wakil sekretaris PP Muhammadiyah berifat ekuivalen dan kolokatif. Artinya, Hajriyanto Y Tohari sama dengan sekretaris PP Muhammadiyah. Buktinya kalimat (25) dapat diubah demikian” *Menurut Hajriyanto Y Tohari, calon ketum PP Muhammadiyah nantinya akan dipilih dalam Muktamar atau Menurut wakil sekretaris PP Muhammadiyah, calon ketum PP Muhammadiyah nantinya akan dipilih dalam Muktamar.*” Dalam hal ini komunitas Muhammadiyah dan PAN sudah pasti

mengetahui bahwa sekretaris PP Muhammadiyah adalah Hajriyanto Y Tohari. Sifat ekuivalensi dan kolokasi juga terdapat pada kalimat (26) bahwa Menteri Luar Negeri AS sama dengan Condoleezza Rice.

Referensi sebutan adalah pengacuan yang berkaitan dengan karakter yang melekat pada acuan. Tidak seperti referensi ekuivalensi, referensi sebutan tidak selalu kolokatif.

(26) Namun ia berhasil secara meyakinkan meminggirkan *pemain politik kelas berat* seperti Hatta Rajasa dan mempecundangi *para selebriti politik* seperti Fuad Bawazier serta *konseptor-intelektual* seperti Didik J Rachbini dan Moeslim Abdurahman. (Kompas, 12 April 2005)

Sebutan *pemain politik kelas kakap*, *para selebriti politik*, dan *konseptor-intelektual* tidak bersifat kolokatif dengan acuannya yaitu *Hatta Rajasa, Fuad Bawazier, Didik J Rachbini, dan Moeslim Abdurahman*. Kedudukan mereka tidak dapat saling menggantikan (kolokasi) karena mereka itu hanya sebagian dari habitat politik yang ada. Pemain politik kelas kakap bukan hanya Hatta Rajasa, ada Alwi Sihab, Megawati, SBY, dsb. Para selebriti politik bukan hanya Fuad Bawazir, ada juga Agung Laksana, Akbar Tanjung, dsb.

Referensi historis adalah pengacuan terhadap sejarah seorang tokoh atau peristiwa. Referensi historis ini bersifat eksoforis karena penulis tidak mungkin menuliskan historis tokoh atau peristiwa dalam tulisannya di media massa. Jika hal ini dilakukan, tentu memakan tempat, tulisan menjadi tidak terfokus. Padahal tulisan di surat kabar harus ringkas dan padat. Oleh karena itu, referensi historis bersifat eksoforis dan pemahamannya diserahkan kepada pembaca.

- (27) Rekam jejak politik AR menunjukkan bahwa sebagaimana para politisi umumnya, AR dapat dengan ringan tanpa beban “menelan ludah politik”-nya sendiri. (Kompas, 12 April 2005).

Korpus *rekam jejak politik AR* merupakan referensi historis. Pembaca diharapkan oleh penulis untuk mengingat atau membaca kembali tentang sejatrah perjalanan AR di bidang politik. Referensi historis juga terdapat pada contoh (4). Pembaca diajak mengingat kembali lahirnya Pancasila yang berembrio Piagam Jakarta. Ini berarti pembaca mengajak mengingat kembali sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Referensi komparatif terjadi apabila terdapat perbandingan antara pengacu dan acuan.

- (28) Resolusi ITF muncul karena Indonesia dianggap tidak serius menangani kasus perompakan di Selat Malaka, seperti dua kasus terakhir terhadap kapal tunda (tug boat) milik Jepang Idaten dan kapal tanker MV Tri Samudra milik PT Humpuss beberapa waktu lalu. (Kompas, 27 Mei 2005).
- (29) ... dengan kata lain, demi mendapatkan keuntungan ekonomi, media massa akan melakukan keberpihakan kepada calon tertentu (Jawa Pos, 15 April 2005).

Korpus *seperti* pada contoh (28) mengacu pada dua kasus yang disebutkan berikutnya. Namun, dua kasus itu sebagai acuan perbandingan dengan beberapa perompakan yang selalu terjadi di Selat Malaka. Referensi perbandingan (komparatif) dengan kata *seperti* memiliki implikasi bahwa yang dibandingkan bersifat sejenis, misalnya sama-sama perompakan, hanya saja terjadi pada objek, tempat, dan kualitas yang berbeda. Referensi perbandingan

dalam wacana politik juga dapat menggunakan korpus *laksana, sama, sesuai dengan, tidak berbeda dengan, tidak lain, sepadan, demikian halnya, hal yang sama, dsb.*

Lain halnya dengan perbandingan dengan menggunakan *dengan kata lain*. Pada perbandingan *dengan kata lain*, pembanding berusaha melakukan analogi dengan melalui tahap analisis. Dengan demikian, perbandingan itu lebih bersifat analogis. Perbandingan belum tentu sama atau sejajar, tetapi perbandingan analogis berifat kongruen. Pengacu dan yang diacu memiliki karakteristik yang relatif sama walaupun dengan objek yang berbeda.

#### 4. Referensi Ditinjau dari Wujudnya

Berdasarkan wujudnya referensi dapat berupa kata, frase, kalimat, paragraf, bahkan wacana. Hal ini sejalan dengan pendapat Schiffrin (1994:24) bahwa analisis wacana memerikan bahasa dalam satuan morfem, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Frekuensi paling tinggi wujud referensi dalam wacana politik terdapat pada referensi berwujud frase, kemudian kalimat, paragraf, baru kata dan wacana.

Referensi kata tidak mudah ditemukan dalam paparan wacana politik di surat kabar. Namun demikian, bukan berarti tidak ada, tetapi referensi berupa kata kurang produktif. Hal ini dapat didukung argumen bahwa (1) tulisan wacana politik (baik yang berupa opini, berita, ataupun kajian ilmiah populer) bersifat terpadu, utuh, dan “tuntas”. (2) Olahan secara analitis terhadap isi wacana mengakibatkan referensi berupa kata tidak produktif, kecuali kata itu menjadi bahasa khusus. Referensi kata dapat dilihat pada contoh (5) dan (11). Pada contoh (5) *organisasi Islam modern ini* mengacu pada Muhammadiyah atau PAN, sedangkan *partai berlambang sinar matahari* jelas mengacu pada PAN.

Referensi frase pada wacana politik sangat produktif, dibanding dengan wujud referensi lainnya. Penulis sangat dengan mudah untuk mengacu pada acuan yang berupa frase. Pada umumnya referensi frase cenderung didominasi referensi endofora anaforis. Artinya, referensi dalam teks dengan acuan pada satuan lingual (anteseden) yang telah disebutkan sebelumnya (*forward-looking*).

(30) ...karena itu krusial untuk diraih adalah kelompok muslim terdidik di perkotaan. Kelompok ini semakin kritis terhadap partai politik dan politisi. (Kompas, 12 April 2005).

(31) Ke-13 orang itulah yang akan menjadi pengurus Muhammadiyah. Mereka juga berhak memilih satu orang dari mereka sebagai ketua PP Muhammadiyah (KR, 19 Mei 2005).

Korpus *kelompok ini* pada contoh (30) mengacu pada frase *kelompok muslim terdidik di perkotaan*. Demikian juga korpus *mereka* pada contoh (31) mengacu pada frase *ke-13 orang*. Referensi ini bersifat endofora anaforis.

Referensi kalimat kalah produktif dibandingkan dengan referensi frase. Penulis sangat jarang mengacu pada suatu kalimat secara utuh. Barangkali referensi kalimat secara utuh hanya akan mengulang informasi yang tidak perlu. Dalam kalimat terdapat fungtor-fungtor pendukung kalimat. Fungtor-fungtor inilah yang lebih banyak diacu, daripada kalimat secara utuh. Dalam studi wacana, kalimat merupakan struktur sintetis, yaitu keterjalinan dan saling pengaruh antar fungtor dalam kedudukannya (tema-remas, topik-komen, subjek-predikat) (Ricoeur dan Ricoeur, 1996: 11). Referensi kalimat secara utuh seperti berikut.

(32) Alwi mendesak pimpinan DPR segera merekonstruksi organisasi F-KB.

Menurut Alwi tidak ada alasan bagi pimpinan DPR untuk menolak permintaan tersebut. (KR, 19 Mei 2005).

(33) Tidak dipaksa dan direkayasa untuk melebur menjadi uniform atau seragam. Atas dasar itu, maka sangat tepat jika Pancasila kemudian dijadikan .... (KR, 1 Juni 2005).

Korpus *tersebut* pada contoh (32) mengacu pada kalimat yang disebutkan sebelumnya (endofora anaforis). Demikian juga korpus *itu* mengacu pada kalimat sebelumnya.

Untuk referensi paragraf dalam wacana politik (di surat kabar), referensi kataforis lebih mudah teramati daripada referensi anaforis. Tentang produktivitasnya, baik anaforis maupun kataforis berimbang. Referensi paragraf anaforis mengacu pada uraian paragraf-paragraf sebelumnya, pada umumnya ditandai dengan "*dalam konteks demikian, dalam situasi demikian, dengan berbagai pertimbangan atau alasan tersebut, dsb.*"

Referensi kataforis berupa paragraf didominasi adanya rincian. Referensi ini ditengari oleh korpus *sebagai berikut, berikut ini, atau berikut, misalnya* "dengan alasan sebagai berikut, problem-problem dapat diprediksi berikut ini, diurai berikut, saya mengusulkan solusi berikut, dengan solusi sebagai berikut" Kemudian penulis menguraikan rincian, "*pertama..., kedua..., ketiga..., dan seterusnya*". Referensi kataforis berupa paragraf juga produktif seproduktif kataforis frase.

Referensi paragraf terjadi pada satu paragraf atau lebih, baik anaforis maupun kataforis.

Referensi wacana bersifat eksoforis. Artinya referensi wacana mengacu pada wacana di luar teks. Referensi wacana bersifat eksoforis dengan rasional (1) tidak mungkin referensi wacana itu endoforis sebab akan menjadi tulis ganda wacana

(wacana yang diacu dan yang sedang ditulis), (2) jika endoforis dilakukan mengakibatkan luasnya tulisan (berlembar-lembar), sedangkan media massa (surat kabar) menghendaki tulisan padat dan berisi sekitar (4-5 halaman). (3) Referensi wacana bukan merupakan pokok bahasan sehingga tidak perlu dihadirkan dalam teks, juga diacu di luar teks (eksoforik). Kita lihat kembali contoh (27). Pembaca diajak oleh penulis mengacu pada perjalanan (secara historis) sepak terjang AR selama menjadi politisi. Sepak terjang secara historis cukup diacu secara eksoforis, tidak perlu sejarah itu dihadirkan dalam teks karena akan memakan tempat dan penulis menganggap bahwa pembaca telah memiliki pemahaman yang sama tentang perjalanan tokoh politik AR.

Demikian pula referensi pada contoh (4) penulis mengajak pembaca mengenang wacana lahirnya Pancasila. Kelahiran Pancasila didahului dengan Piagam Jakarta.

## 5. Simpulan

Berdasarkan pembahasan referensi sebagai aspek gramatikal dalam wacana politik dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Referensi sebagai sarana pembentuk kohesif dalam suatu wacana politik cenderung bersifat formal dan baku.
2. Dalam wacana politik terdapat berbagai referensi. Ditinjau dari jenisnya terdapat referensi endofora dan eksofora. Ditinjau dari sifatnya terdapat referensi anafora, katafora, anafora, dan katafora. Ditinjau dari macamnya terdapat referensi persona, referensi demonstratif, dan referensi komparatif. Referensi demonstratif terdiri dari referensi temporal, lokasional, situasional, ekuivalensi, sebutan, dan historis. Ditinjau dari wujudnya terdapat referensi kata, frase, kalimat, paragraf, dan wacana.
3. Referensi endofora lebih produktif daripada referensi eksofora.
4. Referensi anafora lebih produktif daripada referensi katafora.
5. Referensi frase merupakan referensi paling produktif dibandingkan dengan referensi kata, kalimat, paragraf, dan wacana.
6. Referensi katafora cenderung berupa frase dan paragraf.
7. Referensi wacana bersifat eksofora.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan dkk. 2000. *Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Brown, Gillian & Yule, George. 1983. *Discourse Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bublitz, Wolfram. 1988. *Supportive Fellow-Speakers and Cooperative Conversation*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Cook, Guy. 1989. *Discourse*. Oxford: Oxford University Press.
- Coulthard, Malcolm. 1979. *An Introduction to Discourse Analysis*. London: Longman.
- Eriyanto, 2005. *Analisis Wacana. Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Finch, Geoffrey. 1998. *How to Study Linguistics*. Hongkong: MacMillan.

- Halliday, M.A.K & Hasan, Ruqaiya. 1979. *Cohesion in English*. London: Longman.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective*. Terjemahan Asruddin Barori Tou. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press.
- Kusrianti, Anik. 2004. "Wacana Iklan Pigeon Two Way Cake Kajian Kohesi Tekstual dan Kontekstual" dalam *Analisis Wacana*. Hlm. 1-17. Bandung: Pakar Raya.
- Leech, Geoffrey. 1993. *Prinsip-prinsip Pragmatik*. Terjemahan M.D.D. Oka. Jakarta: Penerbit UI.
- Lyons, John. 1977. *Semantics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rani, dkk. 2004. *Analisis Wacana: Sebuah Kajian Bahasa dalam Pemakaian*. Malang: Bayumedia.
- Ricoeur, P & Ricoeur, P. 1996. *Teori Penafsiran Wacana dan Makna Tambahan*. Terjemahan Hani'ah. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Schiffrin, Deborah. 1994. *Approaches to Discourse*. Oxford: Blackwell.
- Sumarlam. Ed. 2003. *Teori dan Praktik Analisis Wacana*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- \_\_\_\_\_. Ed. 2004. *Analisis Wacana*. Bandung: Pakar Raya.
- Wales, Katie. 2001. *A Dictionary of Stylistics*. London: Longman.
- Zen, Fathurin. 2004. *NU Politik Analisis Wacana Media*. Yogyakarta: LKIS.